

KARAKTERISTIK BUMDES PESISIR PADA KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN MALUK SUMBAWA BARAT

Ibrahim^{1*}, Setiadi², Muhammad Saleh³, Arsyad Abdul Gani¹, Mintasrihardi¹, Junaidi Am¹, Mas'ad¹, Kamaludin¹

¹Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

²Universitas Gadjah Mada, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

*e-mail: ibrahimali.geo@gmail.com

Abstrak

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai aset ekonomi berada di desa dengan Pengelolaan sepenuhnya oleh masyarakat belum memiliki pemanfaatan dalam mendukung ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik badan usaha milik desa pesisir pada kawasan pertambangan emas di Kecamatan Maluk Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei yang mengambil sampel dari sejumlah populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat mengumpulkan data utama. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1701 rumah tangga. penentuan sampel responden menggunakan tehnik *proportional random sampling*. Penentuan sampel responden rumah tangga menggunakan sampel sebesar 5 persen. Persebaran responden pada lokasi penelitian berdasarkan jumlah populasi (rumah tangga). Jumlah sampel responden pada masing-masing lokasi penelitian sebanyak 89 responden. Analisis yang digunakan untuk menguji tujuan tersebut menggunakan analisis frekuensi dan tabulasi silang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik BUMDes pesisir pada kawasan pertambangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan organisasi dalam kategori tertinggi pada level rendah mencapai 61,8 persen, program BUMDes pada kategori tertinggi pada level terendah mencapai 61,79 persen dan sumberdaya pengelola pada kategori tertinggi pada level terendah mencapai 61,79 persen. Keberadaan BUMDes ditengah masyarakat diperlukan kemitraan dengan semua pihak, sehingga organisasi, program dan pengelola sumberdaya dapat meningkat serta berdaya saing.

Kata Kunci: Karakteristik; BUMDes; Pesisir; Kemitraan

Abstract

The existence of Village-Owned Enterprises (*BUMDes*) as an economic asset is located in the village with complete management by the community yet has no utilization to support the community's economy. This study aimed to analyze the characteristics of business entities owned by coastal villages in the gold mining area in Maluk District, West Sumbawa. Take a sample from a number of populations and use a questionnaire as a primary data collection tool. The population in this study was 1701 households. Determination of the sample of respondents using a proportional random sampling technique. Determination of the sample of household respondents using a sample of 5 percent. The distribution of respondents at the research location is based on the population (households). The number of respondents in each research location was 89 respondents. The analysis used to test this objective uses frequency analysis and cross-tabulation. The results of this study indicate that the characteristics of coastal *BUMDes* in gold mining areas in West Sumbawa Regency based on the organization are in the highest category at the low level reaching 61.8

percent, the *BUMDes* program in the highest category at the lowest level reaching 61.79 percent and managing resources in the highest category at the lowest level. The lowest reached 61.79 percent. The existence of *BUMDes* in the community requires partnerships with all parties so that organizations, programs, and resource managers can improve and be competitive.

Keywords: Characteristics; *BUMDes*; Coastal; Partnership

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganेशha.



PENDAHULUAN

UU No 32 tahun 2004 mengamanatkan bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, maka desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Ridlwani & Unila, 2014). Beberapa studi awal menunjukkan adanya kontribusi ekonomi yang tinggi dari Bumdesa bagi perekonomian desa (Prasetyo, 2016) (Ramadana & Ribawanto, 2010). Namun demikian, penelitian lain masih menunjukkan peran Bumdes belum optimal (Amri, 2015). Optimalisasi Bumdes dapat ditingkatkan melalui peningkatan kepercayaan kepada masyarakat yang terwujud pada partisipasi (Chikmawati, 2019).

Peran positif Bumdes dalam pembangunan desa yang ditunjukkan beberapa penelitian merupakan kabar baik, tidak saja dari sisi menguatnya peran kelembagaan baru, tetapi juga semakin terbuka peluang terkikisnya dengan kemiskinan, dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,8% dari total populasinya (Aji, 2015).

Strategi pembangunan desa berbasis peningkatan kapasitas kelembagaan seperti Bumdes bisa menjadi pilihan strategi pengentasan kemiskinan, sebuah masalah yang selalu membebani kehidupan masyarakat desa, di luar masalah pengangguran dan beragam permasalahan lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM (Srirejeki, 2018). Pembangunan

desa akan menciptakan keberadaan desa sebagai tulang punggung pembangunan dari bawah.

Pengembangan Bumdes akan mendorong masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya, serta membangun sarana dan prasarana di desa. Namun demikian, tanpa perhatian dan bantuan serta stimulan dari pihak-pihak luar desa dan pemerintah proses pembangunan di desa berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan di desa terkesan lamban dan cenderung terbelakang (Muhi, 2011).

Masyarakat pedesaan memiliki pandangan hidup, perilaku, sistem kelembagaan masyarakat dan kepemimpinan. Perubahan kondisi masyarakat pedesaan banyak dipengaruhi oleh pergeseran sumber kehidupan dari pertanian ke sektor jasa dan perdagangan. Perubahan yang terjadi dalam perkembangannya semakin mempercepat perubahan di pedesaan baik dalam hal mata pencaharian di desa yang semakin bervariasi maupun dalam hal kultur dan tata nilai situasi ini yang menyebabkan kajian tentang masyarakat desa selalu menarik untuk dilakukan (Angkasawati, 2015).

Secara khusus artikel ini ditulis dari kajian tentang masyarakat desa pesisir. Desa pesisir memiliki karakteristik antara lain: (1) desa pesisir tipe sumber bahan

makanan, yaitu desa-desa yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencaharian sebagai petani sawah; (2) desa pesisir tipe tanaman industri, yaitu desa-desa yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencaharian sebagai petani tanaman industri; (3) desa pesisir tipe nelayan/empang, yaitu desa-desa yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, petambak, dan pembudidaya perairan; dan 4) desa pesisir tipe niaga dan transportasi, yaitu desa-desa yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencaharian sebagai pedagang antarpulau dan penyedia jasa transportasi antar wilayah (Kusnadi, 2010).

Kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan. 3 tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian (Fatmasari, 2016).

Tidak setiap desa mencirikan kehidupan dalam kemiskinan. Dalam konteks masyarakat Sumbawa, tingkat kemiskinan pada perdesaan kawasan pertambangan emas Sumbawa Barat relative rendah. Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan nilai gabungan ukuran karakteristik topografi berbukit kemiskinan adalah 84 persen dan topografi datar 83,7 persen disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, kualitas rumah, kepemilikan tanah pertanian, kepemilikan ternak, kepemilikan barang-barang berharga (Ibrahim et al., 2016). Situasi ini berbeda apabila dilihat dari sisi kehidupan sosial, mulai pudarnya prinsip kegotongroyongan

khususnya dari segi pemberdayaan di masyarakat perdesaan.

Salah satu usaha yang dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian sebuah desa, yakni dengan pendirian lembaga usaha bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Nursetiawan, 2018). Pengelolaan BUMDes pada kawasan pesisir memiliki peranan penting dalam peningkatan pendapatan asli Desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang di inginkan (Kurniawan, 2016), (Negoro, 2018) dan (Harahap, Panggabean, & Al Qamari, 2019).

Keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa menjadi salah satu program desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peranan BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa memiliki kekuasaan dalam mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes akan dapat mendorong dibukanya usaha baru dan dapat mengurangi tingkat pengangguran (Ali, et.al., 2019).

Potensi Kabupaten Sumbawa Barat cukup besar untuk menjadikan Bumdes sebagai motor penggerak perekonomian desa. Kabupaten ini ada 57 desa yang telah memiliki BUMDes. Keberadaan BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, diharapkan menjadi pembeda bagi akselerasi kegiatan perekonomian desa, Keberadaan dan kinerja BUMDes diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan warga masyarakat.

Pengelolaan BUMDes yang baik akan mampu memberikan kontribusi dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan terutama bagi masyarakat sekitar. BUMDes pada perdesaan kawasan pertambangan emas belum berhasil secara total dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dari unit-unit program BUMDes yang ada. BUMDes Kawasan pertambangan emas memiliki kelebihan yaitu mudahnya akses keuangan dan peningkatan ekonomi rumah tangga. Sedangkan kelemahannya terletak pada sumberdaya manusia selaku pengelola dan rencana usaha yang rendah. Perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjalankan program BUMDes menuju ekonomi berkemajuan. (Ibrahim & Sutarna, 2018)

BUMDes pada perdesaan kawasan pertambangan emas belum berhasil secara total dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dari unit-unit program BUMDes yang ada. BUMDes Kawasan pertambangan emas memiliki dua kelemahan, yaitu sumberdaya manusia pengelola, yang ditunjukkan dengan kurangnya jumlah SDM pengelola yang memiliki kemampuan yang memadai. Kedua, adalah rencana usaha rendah, dalam arti mereka kurang memiliki kapasitas untuk membuat perencanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, tidak salah apabila kemudian perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjalankan program BUMDes menuju ekonomi berkemajuan (Ibrahim et al., 2020).

Tingkat kegagalan BUMDes pada kawasan pertambangan emas memiliki faktor penghambat dan pendukung. a faktor penghambat BUMDes pada kawasan pertambangan emas adalah (1) faktor anggaran, (2) faktor Sumberdaya Manusia pengelola, dan (3) Terbatasnya dukungan dari pihak swasta, Faktor pendukung sebagai penguat adalah: (1) komitmen pemerintah, dan (2) tersedianya potensi Sumber Daya Alam. Keberadaan factor penghambat karena banyak program

pemerintah yang dibiayai. Diperlukan kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing (Ali et al., 2019).

Berbagai kelemahan dan kelebihan dari BUMDes pesisir pada wilayah pertambangan sebagai hal penting mencari solusi yang dihadapi. Hal ini mengingat pada dasarnya, Bumdes wilayah tersebut memiliki banyak keunggulan kompetitif dibandingkan dengan wilayah lain karena adanya program-program CRS dari perusahaan, seperti di beberapa negara (Hinojosa, 2013)(Horsley et al., 2015)(Maconachie, 2014)(Wegenast & Beck, 2020).

Berdasarkan masalah diatas penelitian Bumdes akan memberikan nuansa lain dalam kajian tentang perkembangan social-ekonomi masyarakat di desa pesisir terutama pada kawasan pertambangan emas. Penelitian ini bertujuan mengkaji karakteristik Badan Usaha Milik Desa Pesisir pada kawasan pertambangan emas di Kecamatan Maluk Sumbawa Barat.

METODE

Ruang lingkup penelitian ini termasuk tingkat meso yakni mencakup kabupaten, dan desa administratif di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unit analisis dan tingkat mikro menggunakan rumah tangga sebagai unit analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *survey*. Data untuk analisis desa tingkat meso menggunakan data sekunder. Analisis mikro menggunakan data primer dengan rumah tangga sebagai unit analisis. Data primer dikumpulkan dari sampel rumah tangga yang ditentukan menggunakan *proportional sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif.

Pengambilan data dalam penelitian ini di fokuskan pada desa pesisir pada

Kawasan pertambangan emas di Kecamatan Maluku Sumbawa Barat. ada tingkat meso pemilihan sampel desa pada desa dari lokasi penelitian dilakukan secara *purposive random sampling* dengan dasar kedua desa tersebut memiliki karakteristik sebagai desa pesisir. Pemilihan Desa Pasir Putih dan Desa Benete. Kajian pada tingkat mikro dalam penelitian ini menggunakan penelitian survei. Unit analisis penelitian adalah rumah tangga yang diwakili oleh Kepala Keluarga [KK] sebagai responden. Pelaksanaan penentuan sampel responden menggunakan tehnik *proportional random sampling*.

Tabel 1. Desa, Populasi Dan Sampel Penelitian

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga	Responden
1	Benete	636	33
2	Pasir Putih	1.065	56
	Jumlah		89

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2021

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa populasi setiap sampel desa terpilih berdasarkan pada *proportional Random sampling*. Penentuan sampel responden rumah tangga menggunakan sampel sebesar 5 persen. Persebaran responden pada lokasi penelitian berdasarkan jumlah populasi (rumah tangga). Jumlah sampel responden pada masing-masing lokasi penelitian sebanyak 89 responden. Analisis yang digunakan untuk menguji tujuan tersebut menggunakan analisis frekuensi dan tabulasi silang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik BUMDes Pesisir

Desa tertinggal identik dengan desa pesisir, namun karena usaha warga desa pesisir melihat peluang usaha yang ada dan atas bantuan pemerintah akhirnya desa pesisir bisa memiliki perekonomian yang

jauh lebih baik dari sebelumnya. Peluang usaha desa yang sesuai dan cocok banyak di sekitar desa sebagai potensi unggulan desa. Peluang usaha itu tidak nampak atau tidak di sadari. Melihat peluang usaha dan memanfaatkan potensi di desa yang letaknya di pesisir ini, tentunya hal ini akan sangat berguna dan sangat membantu desa dan masyarakat.

Keberadaan BUMDes sebagai Lembaga ekonomi terdekat dengan masyarakat. BUMDes akan berperan aktif dalam mendukung ekonomi desa terutama dengan membeli hasil laut dan hasil bumi masyarakat. BUMDes pesisir pada kawasan pertambangan emas di Sumbawa Barat memiliki karakteristik secara rinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Organisasi

Klasifikasi	Jumlah	Persen
Rendah	55	61.8
Sedang	4	4.5
Tinggi	30	33.7
Total	89	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa persebaran karakteristik BUMDes pesisir pada Kawasan pertambangan emas berdasarkan pada factor organisasi tertinggi pada klasifikasi rendah mencapai 55 atau 61,8 persen, Tinggi mencapai 30 atau 33,7 persen dan sedang mencapai 4 atau 4,5 persen. Keberadaan organisasi tertinggi pada klasifikasi rendah sebesar 55 responden atau sebesar 61,8 persen. Keberadaan organisasi sebagai pengemban utama maju dan mundurnya organisasi BUMDes di tengah masyarakat perdesaan.

Keberadaan organisasi BUMDes pada Kawasan pertambangan kenyataan belum mampu memberikan manfaat pada factor keberadaan organisasi ditengah masyarakat desa. Keberadaan BUMDes

memiliki kelemahan dalam pelaksanaan terutama rendahnya sumberdaya manusia pengelola dan terbatasnya anggaran dalam mengembangkan usaha. Factor penghambat BUMDes pada kawasan pertambangan emas adalah 1) faktor anggaran, 2) factor Sumberdaya Manusia pengelola, dan 3) Terbatasnya dukungan dari pihak swasta,. Factor pendukung sebagai penguat adalah 1) komitmen pemerintah, dan 2) tersedianya potensi Sumber Daya Alam. Keberadaan factor penghambat karena banyak program pemerintah yang dibiayai. Diperlukan kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing (Ali et al., 2019)

Keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa, sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja (Berlian Ramadana & Ribawanto, 1068).

Selain faktor tersebut masih rendahnya kemampuan organisasi dalam pemberdayaan masyarakat sebagai penerima dampak BUMDes. Pola pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes adalah 1) melalui pola mitra, 2) pendapatan masyarakat, dan 3) lapangan kerja. Keberadaan program BUMDes sudah berjalan, tetapi memiliki kelemahan di bidang pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu pola kemitraan yang berkelanjutan dengan semua pihak, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan yang berkepanjangan (Ibrahim et al., 2020).

Berbeda dengan keberadaan program BUMDes masih belum berjalan maksimal. Masih ada desa yang baru

mendirikan BUMDes pun BUMDes yang sudah terbentuk, belum seluruhnya yang berjalan dengan lancar. Hal ini karena kurang pemahamnya pemerintah desa berkaitan dengan tata kelola BUMDes. Kondisi ini diperkuat pada data Tabel 3.

Tabel 3. Persebaran Program Bumdes

Klasifikasi	Jumlah	Persen
Rendah	55	61.79
Sedang	4	4.5
Tinggi	30	33.7
Total	89	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa persebaran program BUMDes pesisir pada Kawasan pertambangan emas tertinggi pada klasifikasi rendah mencapai 55 atau 61,79 persen, Tinggi mencapai 30 atau 33,7 persen dan sedang mencapai 4 atau 4,5 persen. Keberadaan program tertinggi pada klasifikasi rendah sebesar 55 responden atau sebesar 61,79 persen.

Keberadaan program sebagai tulang punggung dalam peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Program berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDes belum berjalan secara keseluruhan. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDes (Tama & Yanuardi, 2013).

Keberadaan program BUMDes pesisir pada Kawasan pertambangan emas belum mampu memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat. Kondisi masih terbatasnya kreatifitas pengelola dalam mengembangkan program. Partisipasi masyarakat dalam unit usaha pinjaman bergulir program BUMDes memiliki tingkat partisipasi rendah. Faktor internal yang memiliki hubungan dengan partisipasi

adalah tingkat pendapatan. Faktor eksternal dengan tingkat partisipasi memiliki hubungan yang kuat yaitu tingkat ketersediaan sarana dan prasarana. Penelitian ini pun menemukan bahwa tingkat efektivitas program tergolong rendah. Tingkat partisipasi dengan tingkat efektivitas program yang memiliki hubungan adalah tujuan program (Satia & Sadono, 2019). Diperlukan kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing. (Ali et al., 2019).

Keberadaan program BUMDes harus didukung sumberdaya berasal dari pengelola BUMDes. Selain keunggulan dan kekuatan yang dimiliki, BUMDes juga menghadapi berbagai permasalahan dalam aspek pendirian, kelembagaan, fasilitas, sumberdaya manusia, manajemen, dan finansial. Arah kebijakan pengembangan BUMDes diharapkan dapat kuat secara internal dan mapan secara eksternal baik melalui kerjasama maupun sinkronisasi program BUMDes dengan program pemerintah.

Peran berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat dan menjadikan BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa. Daya dukung sumberdaya pada masyarakat dalam bersaing ditengah ekonomi global saat ini. Keberhasilan BUMDes pesisir kawasan pertambangan emas pada Tabel 4.

Tabel 4. Sumber Daya Pengelola Program Bumdes

Klasifikasi	Jumlah	Persen
Rendah	55	61.79
Sedang	6	6.74
Tinggi	28	31.46
Total	89	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa sumberdaya pengelola BUMDes tertinggi pada klasifikasi rendah mencapai 55 atau 61,79 persen, Tinggi mencapai 28 atau 31,46 persen dan sedang mencapai 6 atau 6,74 persen. Keberadaan sumberdaya pengelola tertinggi pada klasifikasi rendah sebesar 55 responden atau sebesar 61,79 persen.

Selain faktor sumber daya alam dan potensi ekonomi desa menjadi penting sebagai modal utama untuk mengembangkan program berbasis pada kearifan local. tentu menjadi sangat penting adalah keberadaan Sumber Daya Manusia pengelola yang mampu dan memiliki pengetahuan cukup mengenai Badan usaha Milik Desa. Sumber Daya Manusia sebagai pilar utama yang akan menjalankan BUMDes, karenanya tidak boleh diisi oleh sembarang orang, harus benar-benar individu yang memiliki kapasitas dalam menjalankan usaha. Adanya komitmen kuat antara seluruh stakeholder untuk meningkatkan status kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan otoritas dari BUMDes (Hekmatyar & Nugroho, 2018).

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, Terjadinya perbedaan kepentingan diantara warga masyarakat (Djaha, 2017). Selain itu, pengembangan BUMDes adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola yang masih minim pengalaman dan jiwa wirausaha sehingga berdampak pada stagnasi unit usaha BUMDes. Faktor komunikasi yang tidak efektif dan terbatasnya beberapa arus informasi disepertaran elit desa. Perbedaan penafsiran terhadap regulasi terkait BUMDes, rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat serta skala dan jangkauan usaha yang ada masih terbatas (Jaya & Rafi, 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Karakteristik badan usaha milik desa pesisir pada kawasan pertambangan emas masih memiliki tingkat organisasi, program dan sumberdaya pengelola BUMDes masih rendah. Selain itu, keberadaan BUMDes ditengah masyarakat diperlukan kemitraan dengan semua pihak, sehingga organisasi, program dan pengelola sumberdaya dapat meningkat serta berdaya saing.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama pada pihak-pihak LPPM yang telah membiayai penelitian ini dan pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian dilapangan Bappeda dan Litbang Sumbawa Barat, BPMD KSB, Desa Se-Kecamatan Maluk Pengelola BUMDes dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, E. K. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Aji, P. (2015). *Summary Of Indonesia's Poverty Analysis* (No. 04; Issue 04).
- Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V21i3.23464>
- Amri, K. (2015). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(3), 295–299.
- Angkasawati. (2015). Masyarakat Desa. *Jurnal Publiciana*.
- Berlian, R. C., & Ribawanto, H. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*.
- Chikmawati, Z. (2019). Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis Vol.5*, 5(1), 101–113.
- Djaha, Z. A. (2017). Desain Model Badan Usaha Milik Desa Di Desa Bampalola Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*. <https://doi.org/10.25139/Jaap.V1i2.398>
- Fatmasari, D. (2016). Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. *Al-Amwal*. <https://doi.org/10.24235/Amwal.V6i1.255>
- Hekmatyar, V., & Nugroho, F. (2018). Badan Usaha Milik Desa Dan Pembangunan Sosial Di Kabupaten Bojonegoro. *Sosio Konsepsia*. <https://doi.org/10.33007/Ska.V7i3.1444>
- Hinojosa, L. (2013). Change In Rural Livelihoods In The Andes: Do Extractive Industries Make Any Difference? *Community Development Journal*, 48(3), 421–436. <https://doi.org/10.1093/Cdj/Bst023>
- Horsley, J., Prout, S., Tonts, M., & Ali, S. H. (2015). Sustainable Livelihoods And Indicators For Regional Development In Mining Economies. *Extractive Industries And Society*, 2(2), 368–380. <https://doi.org/10.1016/J.Exis.2014.12.001>
- Ibrahim, Baiquni, M., Ritohardoyo, S., & Setiadi. (2016). Characteristics Of Poverty In Rural Communities Of Gold

- Mining District Area West Sumbawa. *Mimbar*, 32(1), 163–174.
- Ibrahim, I., & Sutarna, I. T. (2018). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Tataloka*. <https://doi.org/10.14710/Tataloka.20.3.309-316>
- Ibrahim, Mintasrihardi, Kamaluddin, Mas'ad, & Syukuriadi. (2020). Community Empowerment Pattern Through Village-Owned Enterprise Strategy In The Gold Mine Area Of West Sumbawa, Indonesia. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/413/1/012036>
- Irfandi, I., Harahap, M. H., Panggabean, D. D., Syah, D. H., & Al Qamari, M. (2019). Pendampingan Dan Pengembangan Kerajinan Anyam Khas Melayu Pesisir Di Pantai Cermin Propinsi Sumatera Utara. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.32696/Ajpkm.V3i2.293>
- Jaya, R., & Rafi, M. (2019). Analisis Hambatan Dalam Pengembangan Bum Desa. *Jurnal El-Riyasah*. <https://doi.org/10.24014/Jel.V9i1.6823>
- Kusnadi. (2010). Budaya Masyarakat Nelayan. *Jelajah Budaya*.
- Maconachie, R. (2014). Mining For Change? Youth Livelihoods And Extractive Industry Investment In Sierra Leone. *Applied Geography*, 54, 275–282. <https://doi.org/10.1016/J.Apgeog.2014.05.009>
- Muhi, A. H. (2011). Fenomena Pembangunan Desa. *Institute Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Negoro, A. H. S. (2018). Inovasi Bumdes Dalam Pengelolaan Potensi Kewirausahaan Masyarakat Pesisir. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan Iv*.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, XI(1), 86–100.
- Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. & S. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa: Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 1(6), 1068–1076.
- Ridwan, Z., & Unila, F. H. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440.
- Satia, S. R., & Sadono, D. (2019). Partisipasi Dan Efektivitas Pengembangan Ekonomi Mikro Pinjaman Bergulir Bumdes Di Desa Cilebut Barat Kabupaten Bogor. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm]*. <https://doi.org/10.29244/Jskpm.2.6.783-792>
- Srirejeki, K. (2018). Bumdes Rural Development. *Journal Of Accounting, Management, And Economics*, 20(1), 5–10.
- Tama, D. O. E., & Yanuardi. (2013). Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. *Journal Of Chemical Information And Modeling*.

<https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>

Wegenast, T., & Beck, J. (2020). Mining, Rural Livelihoods And Food Security: A Disaggregated Analysis Of Sub-Saharan Africa. *World Development*, 130(June), 1–12.
<https://doi.org/10.1016/J.Worlddev.2020.104921>